

## **INOVASI PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN FISIK (STUDI PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEKERJAAN UMUM (UPTD PU) DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA)**

**Muhammad Fadli<sup>1</sup>**

### **Abstrak**

**Muhammad Fadli**, *Inovasi Pemerintah Daerah dalam pembangunan fisik (Studi Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pekerjaan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara) Di bawah bimbingan Ibu Dr. Rita Kalalinggi, M.Si sebagai pembimbing I dan Bapak Budiman, S.IP M.Si sebagai pembimbing II. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Inovasi pemerintah daerah dalam pembentukan dan pengelolaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pekerjaan Umum (UPTD PU) di setiap kecamatan Kabupaten Penajam Paser Utara dan faktor-faktor yang mendukung Inovasi pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pekerjaan Umum (UPTD PU) setiap kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (2009). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Kemampuan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam berinovasi membentuk UPTD PU kecamatan cukup baik. UPTD PU merupakan suatu bentuk kerjasama antara semua pihak yang terkait baik Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan, Desa dan masyarakat. Hasil inovasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum (UPTD-PU) Kabupaten Penajam Paser Utara sudah terlihat dari pembangunan yang dilaksanakan UPTD PU disetiap kecamatan yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara. Mulai dari pembangunan jalan usaha tani, pematangan lahan, pembuatan drainase dan normalisasi saluran. Selain itu faktor Pendukung Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum (UPTD-PU) di Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai mana peran pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan yang salah satunya konsisten mendukung UPTD PU kecamatan, Adanya partisipasi masyarakat yang aktif, serta kerjasama semua aspek pemerintah, swasta dan masyarakat demi terwujudnya hasil yang baik.*

**Kata Kunci** : *Inovasi, Pemerintah daerah, UPTD PU, Kabupaten Penajam*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : mfadli824@gmail.com

## **PENDAHULUAN**

Dalam program kementerian PANRB *One Agent, One Innovation* yang berarti bahwa setiap Kabupaten dan Kota wajib menciptakan minimal satu inovasi pelayanan publik setiap tahun dari 514 kabupaten kota yang ada di Indonesia. Kabupaten Penajam Paser Utara yang sebelumnya sudah membuat gebrakan baru melalui Peraturan bupati no 14 tahun 2013 tentang Organisasi dan tata kerja Unit pelaksana teknis pekerjaan umum pada dinas Pekerjaan Umum, dan Penajam merupakan salah satu daerah yang mendapatkan penghargaan nasional inovasi pelayanan publik 2015.

Inovasi yang dilakukan Pemerintahan Penajam ialah program unggulan yang menempatkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pekerjaan Umum (PU) di masing-masing tingkat Kecamatan. Bertugas membantu pembangunan daerah kecamatan secara teknis dan tanpa proses yang panjang. Contohnya pembuatan jalan baru, penanganan kerusakan jalan, tanah longsor, kerusakan drainase serta genangan dan kerusakan-kerusakan lainnya. Adapun tujuannya adalah memecahkan permasalahan-permasalahan yang selama ini muncul khususnya terkait dengan infrastruktur wilayah. Keberadaan UPTD-PU berdampak positif bagi pertumbuhan daerah. UPTD-PU meringankan tugas Dinas PU, serta mempercepat perbaikan dan pembuatan infrastruktur wilayah, khususnya yang berkualifikasi kecil dan sederhana di tingkat pedesaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: pertama, Bagaimana Inovasi Pemerintah daerah dalam pengelolaan Unit Pelaksanaan Teknis dinas Pekerjaan Umum (UPTD PU) di setiap kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara ? kedua, Faktor-faktor apa yang mendukung Inovasi pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis dinas Pekerjaan Umum (UPTD PU) di setiap kecamatan Kabupaten Penajam Paser Utara ?

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Pengertian Inovasi***

Rosabeth moss dalam Ancok Djamiludin (2012:34) mengatakan inovasi adalah sebuah hasil karya pemikiran baru yang diterapkan dalam kehidupan manusia, Dan West & Farr (1990) mendefinisikan inovasi adalah pengenalan dan penerapan dengan sengaja gagasan, proses, produk dan prosedur pada unit yang menerapkannya, yang dirancang untuk memberikan keuntungan bagi individu, kelompok, organisasi dan masyarakat luas.

Selanjutnya Inovasi menurut UU No. 18 tahun 2002 Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.

Inovasi adalah suatu penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Orang atau wirausahawan yang selalu berinovasi, maka ia dapat dikatakan sebagai seseorang yang inovatif. Seseorang

yang inovatif akan selalu berupaya melakukan perbaikan, menyajikan sesuatu yang baru yang berbeda dengan yang sudah ada. Inovatif juga merupakan sikap penting bagi yang hendaknya dimiliki oleh seseorang wirausahawan. Seseorang yang selalu melakukan inovasi dalam usahanya maka keuntungan dan kesuksesan akan ia dapat.

### ***Pemerintah Daerah***

#### ***Pengertian Pemerintah Daerah***

Dalam pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menyebutkan bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.

Selanjutnya menurut Misdyanti dan Kartasapoetra (1993:17), menjelaskan pemerintah daerah adalah penyelenggara pemerintah daerah ataupun pemegang kemudi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Jadi pemerintah daerah terdiri dari Kepala Daerah beserta perangkat daerah lainnya termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di daerah yang difungsikan untuk penyelenggaraan pemerintahan di daerah beserta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintah kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-undang yang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.

#### ***Fungsi Pemerintah Daerah***

Fungsi pemerintah daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan. Fungsi pemerintah daerah menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2014 adalah :

1. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
3. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

Berdasarkan yang disebutkan diatas disimpulkan bahwa fungsi pemerintah daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah yang dimana menjalankan,

mengatur, dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan seperti yang dijelaskan dalam UU No. 23 Tahun 2014.

### ***Azas Pemerintah Daerah***

Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1974. Dalam pelaksanaannya secara garis besar ada beberapa jenis dari masing-masing asas itu, yaitu :

1. Asas Dekonsentrasi, artinya adalah pelimpahan wewenang dari pemerintahan atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat daerah. Pelimpahan wewenang dari aparatur pemerintah yang lebih tinggi tingkatannya ke aparatur lain dalam satu tingkatan pemerintahan disebut dekonsentrasi horizontal. Sedangkan pelimpahan wewenang dari pemerintah atau dari suatu aparatur pemerintah yang lebih tinggi tingkatannya ke aparatur lain dalam tingkatannya pemerintahan yang lebih rendah disebut dekonsentrasi vertikal.
2. Asas Desentralisasi, artinya adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya. Dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dibentuk dan disusun daerah otonom, yang selanjutnya disebut daerah, hal ini sering disebut pula desentralisasi teritorial.
3. Asas Tugas Pembantuan, artinya adalah tugas-tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah atau pemerintah daerah tingkat atasnya, dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya. Urusan yang ditugaskan itu sepenuhnya masih menjadi wewenang pemerintah atau daerah tingkat I.

### ***Inovasi Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Studi Kasus Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pekerjaan Umum)***

Inovasi dapat terjadi dibidang apa saja, termasuk bidang pemerintahan. Pola pemerintahan model lama yang berfokus pada pemerintah pusat kini sudah mulai ditinggalkan. Berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang otonomi daerah, Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini berarti, apa pun bentuk pembangunan yang dilakukan oleh daerah otonom harus tetap dalam kerangka sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sehingga daerah berhak melakukan inovasi dibidang apa saja yang di inginkan dengan tujuan kesejahteraan rakyatnya atau kepentingan rakyatnya.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara melakukan perombakan di dinas pekerjaan umum. Yaitu pembentukan suatu Unit Pelaksana Teknis ditingkat Kecamatan yang dibawah naungan dinas PU dan Ditempatkan di setiap

Kecamatan yang ada di Penajam Paser Utara (UPT PU). UPT PU ini merupakan suatu inovasi pemerintah daerah yang dimana bertujuan membangun ekonomi masyarakat dan infrasetruktur untuk menunjang kesejahteraan rakyat. Pemerintah wajib menciptakan inovasi, inovasi Pemerintah daerah ialah usaha pemerintah menciptakan suatu terobosan baru untuk kemajuan masyarakat Penajam Paser Utara, serta usaha pemerintah untuk mendekatkan diri terhadap masyarakatnya.

### **Metodologi Penelitian**

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan memberikan penjelasan dari variable yang diteliti. Menurut moelong (2006:11) mengemukakan bahwa, deskriptif adalah data yang di kumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka, dari pendapat ini di jelaskan penelitian deskriptif untuk mendapatkan data yang mungkin berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya. Selain itu pertanyaan yang sering di tanyakan adalah mengapa, alasan apa dan bagaimana terjadinya senantiasa di manfaatkan oleh peneliti.

Penulis menggunakan dua sumber data dalam penelitian skripsi ini, yaitu data primer dan data sekunder. Kemudian dalam pengumpulan data-data, diperlukan sejumlah teknik. Untuk itu, penulis menggunakan 2 (dua) teknik pengumpulan data dalam skripsi ini. Teknik-teknik tersebut ialah dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang dilakukan mempelajari dan menggali konsep-konsep dan teori yang berhubungan dengan penelitian ini. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, baik diperpustakaan maupun ditempat-tempat lain. Literatur yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, hasil penelitian, peraturan perundang-undangan, artikel, kamus dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini, sedangkan studi lapangan, yaitu pengumpulan data secara langsung pada obyek penelitian di lapangan, dengan menggunakan beberapa teknik antara lain observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, maka selanjutnya penulis menganalisis data-data tersebut. Seperti halnya pengumpulan data, dalam analisis data juga diperlukan teknik. Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu analisis data model interaktif yang mencakup pengumpulan data, reduksi data penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi).

### **HASIL PENELITIAN**

#### ***Inovasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum (UPTD-PU)***

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum ialah sebuah gagasan pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan daerah dan memenuhi kebutuhan masyarakat pedesaan sesuai dengan tugasnya perbaikan jalan jalan

perkebunan, jalan pertanian, irigasi dan sebagainya yang sesuai tupoksi UPTD PU. Inovasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis dinas Pekerjaan Umum (UPTD PU) ini pertama di Indonesia, dan mendapatkan penghargaan dalam Program Kementrian PANRB dalam Program *one agency one inovvation* 2015 yang merupakan salah satu inovasi daerah terbaik se-Indonesia. Inovasi pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam pembentukan UPTD PU pengelolaannya dibuat dan disesuaikan dengan pola masyarakat kab PPU.

Sistem pengelolaan Unit Pelaksana Teknis dinas Pekerjaan Umum merupakan suatu bentuk kerjasama antara semua pihak yang terkait baik Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan, Desa dan masyarakat. Semua aspek yang terkait harus bekerja sama dalam mengatur serta mengawasi jalannya aktifitas Pembangunan yang dilaksanakan oleh UPTD PU agar pembangunan bisa berjalan dengan baik dan sesuai keinginan masyarakat.

Pengelolaan UPTD PU Kecamatan Kabupaten Penajam Paser Utara Dari awal Pengajuan/usulan hingga hasil pembangunan yaitu:

1. Musyawarah Kelompok Tani tentang usulan pembuatan infrastruktur misalnya: pembuatan jalan, irigasi dan lain-lain yang dimana disepakati oleh seluruh Petani dan masyarakat setempat, kemudian membuat Proposal kegiatan dan surat pernyataan
2. Kelompok Tani atau masyarakat setempat meminta rekomendasi dari Kelurahan atau Desa. Tentang pengajuan Proposal kegiatan yang disepakati bersama
3. Setelah dapat rekomendasi kelompok Tani mengajukan Proposal kegiatan ke kantor Camat, kemudian camat memferifikasi kegiatan apakah memang sesuai kebutuhan atau belum
4. Camat memerintahkan UPTD PU kecamatan untuk menindaklanjuti Proposal yang diajukan kelompok Tani
5. Survey lokasi Kelompok Tani layak atau tidaknya hasil survey secara teknis Disesuaikan dengan tupoksi UPTD PU yang dilaksanakan oleh UPTD PU Apabila survey investigasi di sepakati dan usulan dapat dilaksanakan maka kepala UPTD PU melaporkan hasil survey investigasi kepada Kepala Dinas PU dan menugaskan tim untuk melakukan Perencanaan,
6. Tahap Pengerjaan yang dilaksanakan oleh UPTD PU dan di dampingi oleh masyarakat Melaksanakan pekerjaan berdasarkan arahan atasan, mengkaji RAB yang telah di buat dan memeriksa material dan peralatan yang di butuhkan dilapangan, membuat dokumentasi pelaksanaan pekerjaan dari 0% sampai 100% pekerjaan dan membuat laporan pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
7. Pemeriksaan hasil pekerjaan oleh camat Mengawasi Pelaksanaan pekerjaan dilapangan, memeriksa dan meneliti apakah pekerjaan sesuai dengan rencana, bersama pelaksana melakukan opname pekerjaan secara berkala terhadap item pekerjaan dan melaporkan segala permasalahan-permasalahan di lapangan.
8. Terakhir serah terima dan laporan Hasil pekerjaan Laporan Hasil Pekerjaan: serah terima pekerjaan dilakukan Kepala UPTD PU kepada Camat Ataupun

Kepala Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan hasil pekerjaan dilapangan dan dapat di pertanggung jawabkan secara teknis maupun secara administrasi kegiatan yang disrtai foto dokumentasi kegiatan dilapangan

**Hasil inovasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum (UPTD-PU)**

Beberapa *Output* yang di dilaksanakan UPT-PU Kecamatan Kabupaten Penajam Paser Utara, data dari dinas PU sampai dengan tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
Realisasi Kegiatan UPT-PU Kecamatan s/d Tahun 2015

ITEM PEKERJAAN	Kecamatan				TOTAL
	Penajam	Waru	Babulu	Sepaku	
Pembangunan jalan (m)	63.351,0	33.339,13	8.540,0	38.015,0	143.245,13
Pemeliharaan badan jalan (m)	41.907,0	45.542,35	69.200,0	59.950,0	216.599,35
Perbaikan/Penanganan jalan (m)	950,0	-	20.920,0	19.750,0	41.620,0
Pembuatan drainase (m)	8.945,58	21.403,99	-	150,0	30.499,57
Normalisasi drainase (m)	6.098,0	6.976,53	14.210,0	1.175,0	28.279,53
Pembuatan/perbaikan jembatan (unit)	6	-	8	-	14
Pematangan Lahan/Land Clearing (m2)	229.801,62	163.608,67	18.820,0	123.095,51	535.325,80
Pengerukan Kolam/E mbung (m2)	1.140,0	-	3.406,20	18.035,27	22.581,47

**Faktor Pendukung Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum**

Faktor pendukung Unit Pelaksana Teknis dinas Pekerjaan Umum. Faktor pendukung tersebut ialah:

1. Konsistensi Kebijakan

Konsistensi kebijakan iyalah dimana pemerintah harus menjaga dan mendukung kebijakan-kebijakan yang dibuat dan tidak berubah-ubah, fokus pada satu tujuan yang ingin dicapai dengan kebijakan tersebut. Konsistensinya kebijakan pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam UPTD PU dapat kita lihat dari segi APBD yang selalu digelontorkan untuk pembangunan yang dilaksanakan UPTD PU, suplai sumber daya manusia

yang terus di tingkatkan, serta peyerahan wewenang yang benar benar diberikan kepada Camat, UPTD PU dan Masyarakat.

## 2. partisipasi Masyarakat

Adanya partisipasi masyarakat, baik dalam bentuk pasif maupun aktif, akan mempermudah pekerjaan UPT-PU di lapangan. Partisipasi masyarakat ini juga merupakan salah satu faktor pendukung UPTD PU yang dimana dilihat dari tugas dan fungsi UPTD PU melayani Pembangunan untuk masyarakat secara teknis yang dibutuhkan masyarakat. Pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dan proposal dari masyarakat langsung ini lah yang menjadi Partisipasi aktif masyarakat, serta kegiatan pengawasan dan pebebasan lahan yang menjadi tanggung jawab masyarakat.

## 3. Sinergi dan Koordinasi Stakeholders

Pembangunan yang dilaksanakan UPTD PU tidal lepas dari kordinasi semua pihak. Usulan yang dibuat oleh masyarakat disampaikan kepada Camat kemudian camat menugaskan kepala UPTD PU untuk menindak lanjuti yang kemudian UPTD PU yang mengkordinasikan kepada semua pihak dari masyarakat sampai dengan sektor pemerintahan. Sinergi dan kordinasi seluruh Stakeholders ini lah yang menjadi faktor pendukung UPTD PU agar menciptakan teamwork yang solid guna mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan dan keamanan, serta daya dukung dari pemerintah pusat untuk memaksimalkan potensi daerah untuk kemajuan.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kemampuan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam berinovasi membentuk UPTD PU kecamatan cukup baik. Inovasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum (UPTD-PU) dalam pengelolaan yang dimana kepala daerah melimpahkan kewenangannya kepada camat setempat, terkait hal teknis pembangunan di tingkat kecamatan berdasarkan usulan masyarakat. Yang kemudian camat berkordinasi dengan kepala UPTD PU mengenai pembangunan dan matrialnya. UPTD PU merupakan suatu bentuk kerjasama antara semua pihak yang terkait baik Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan, Desa dan masyarakat. Semua aspek yang terkait harus bekerja sama dalam mengatur serta mengawasi jalannya aktifitas Pembangunan yang dilaksanakan oleh UPTD PU agar pembangunan bisa berjalan dengan baik dan sesuai keinginan masyarakat.
2. Hasil inovasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum (UPTD-PU) Kabupaten Penajam Paser Utara sudah terlihat sangat jelas. Dilihat dari pembangunan yang dilaksanakan UPTD PU disetiap kecamatan yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara. Mulai dari pembangunan jalan usaha tani, Pematangan Lahan, Pembuatan Drainase dan Normalisasi Saluran.



pembangunan infrastruktur inilah yang menunjang prekonomian masyarakat yang bergelut dibidang pertanian dan perkebunan.

3. Faktor Pendukung Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum (UPTD-PU) di Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai mana peran pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan yang salah satunya konsisten mendukung UPTD PU kecamatan, Adanya partisipasi masyarakat yang aktif, serta kerjasama semua aspek pemerintah, swasta dan masyarakat demi terwujudnya hasil yang baik.

### **Saran**

Dari hasil penelitian dan kesimpulan dalam penelitian ini, maka penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Pengembangan inovasi sebagai sebuah sistem tidak dapat sepenuhnya diserahkan pada inisiatif daerah-daerah yang cenderung bersifat parsial dan parokial. Pemerintah pusat harus berperan lebih banyak dalam mengembangkan sebuah sistem inovasi nasional yang akan melembagakan kinerja inovasi, mulai dari riset, implementasi, recognisi, dan replikasi berbagai praktik inovatif sehingga penyebarluasannya menjadi lebih luas. Dukungan dari sisi kebijakan dan anggaran untuk pengembangan sistem inovasi ini perlu diperkuat dengan mengembangkan berbagai skema kemitraan dengan aktor-aktor non pemerintah (swasta), sehingga ada sinergi yang optimal untuk mendorong perkembangan inovasi, baik antara pemerintah dengan non pemerintah maupun antara pemerintah pusat dan daerah-daerah.
2. Perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia anggota UPTD PU kecamatan yang sesuai dengan skill yang dibutuhkan, pembinaan yang berkelanjutan bagi pegawai dan anggota guna terciptanya Profesional dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat,
3. Diharapkan adanya peningkatan fasilitas UPTD PU sendiri dan peningkatan jumlah alat berat guna mempercepat pembangunan.
4. Pemerintah seharusnya memberikan *reward* kepada UPTD PU Kecamatan yang paling produktif, *reward* ini diharapkan menjadi acuan untuk seluruh anggota UPTD PU untuk lebih maksimal melayani masyarakat.

### **Daftar Pustaka**

- Anatanyu, Sapja. 2011. Kelembagaan Petani . *Peran dan Strategi Pengembangan*, Yogyakarta: Graha ilmu
- Bratakusumah, Deddy Supriady & Solihin Dadang, 2004. *Otonomi Peyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Daymon, Christine dan Immy Holloway, 2008. *Metode-metode Riset Kualitatif dalam Public Relations*. Bentang Pustaka, Yogyakarta
- Druker, Peter F,2012. *Inovasi dan Kewiraswastaan*, Erlangga, Jakarta

- Haris, Syamsuddin, 2007. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Lippi Press, Jakarta
- Hanafie, Rita. 2010. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. CV. Andi Offset: Yogyakarta.
- Miles, Matthew dan Huberman, A. Michael, 1992. *Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber Tantang Metode-Metode Baru*, UI Press, Jakarta.
- Moleong, Lexy J, 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Moleong, Lexy J, 2007. *Methodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Rosda Karya, Bandung.
- Sherwood, D. (2002) *Creating Inovvatif Culture*. Oxford: Capstone Publishing.
- Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Grasindo, Jakarta
- Sumarto, Hetifah Sj, 2004. *Inovasi Partisipasi dan Good Governance*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Suyono, Agus ,2001. *Teori dan Isu Pembangunan*, UM. Pres, Jakarta
- Tjokroamidjojo, Bintoro, 1990. *Perencanaan Pembangunan*, CV, Masagung, Jakarta

### **Dokumen**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- Peraturan Bupati Penajam paser Utara Nomor 14 tahun 2013 tentang Organisasi dan tata kerja Unit Peleksana Teknis Pekerjaan Umum pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara
- Peraturan Mentri PANRB No 30 Th 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik
- Surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia nomor 09 Tahun 2015 tentang Kompetisi Inovasi pelayanan publik dilingkungan Kementrian dan Pemerintah Daerah

### **Sumber Internet :**

- <http://jdih.penajamkab.go.id/web/berita.php?p=90&s=bupati-terima-penghargaan-inovasi-pelayanan-publik-2015>
- [http://id.wikipedia.org/wiki/Reka\\_baru/inovasi](http://id.wikipedia.org/wiki/Reka_baru/inovasi)
- <http://www.penajamkab.go.id>